

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi *Good Governance* Di Kecamatan Gembong Pati

Atihatin Nihayah¹, Nevy Rusmarina Dewi²

¹. Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
IAIN Kudus

²Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam
IAIN Kudus

¹atihatinamzatun@gmail.com, ²nevyrusmarina@iainkudus.ac.id

Dikirim: 18 Maret 2024 Direvisi: 25 April 2024 Diterima: 17 Mei 2024

Abstrak

Penelitian ini memiliki latar belakang mengenai partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong yaitu dapat mempengaruhi pelaksanaan peningkatan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong, karena pada hakikatnya tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam terwujudnya suatu pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari tokoh masyarakat dalam mendukung penerapan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian field research. Hasil dari penelitian ini bahwa peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip *good governance* sudah memenuhi standar yang baik, dan adanya peran dari tokoh masyarakat ini dapat menentukan sebagai nasihat, saran, yang mampu memberikan sebuah dorongan kepada masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Keterlibatan tokoh masyarakat untuk pemerintah menjadi pendorong yang penting untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya, pembangunan, pelayanan dan dari segi yang lain. Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong.

Kata Kunci : *Partisipasi, Tokoh Masyarakat, Good Governance, Gembong*

Abstract

This research has a background regarding the participation provided by community leaders in Gembong Subdistrict, which can influence the implementation of improving the principles of good governance in Gembong Subdistrict, because in essence community leaders have a very important role in the realization of a good government. The purpose of this study was to determine the role of community leaders in supporting the application of the principles of good governance in Gembong District. The results of this study are that the role of community leaders in Gembong District in implementing the principles of good governance has met good standards, and the role of these

community leaders can determine as advice, suggestions, which are able to provide encouragement to other communities to participate in every program that is implemented. run. The involvement of community leaders for the government is an important driver to be able to develop the potential of resources, development, services and other aspects. Community leaders in Gembong District can accommodate and channel community aspirations and supervise activities carried out by the Gembong District government.

Keywords: Participation, Community Figures, Good Governance, Gembong

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata Kelola yang baik melalui prinsip-prinsip *good governance* di *Indonesia* tidak hanya diimplementasikan pada pemerintahan di tingkat pusat saja namun menyeluruh ke semua lini sampai tingkat bawah di tingkat Kecamatan dan desa. Semangat reformasi birokrasi menjadi tonggak bagi seluruh jajaran birokrasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good governance* dalam sistem birokrasinya dalam rangka penerapan tata Kelola yang baik. Partisipasi penuh masyarakat dibutuhkan dalam mendukung terselenggaranya prinsip-prinsip *good governance*. Diharapkan menghasilkan pelayanan publik yang baik dan pemerintahan yang bersih, oleh karena itu, penerapan konsep pemerintahan yang baik dalam terselenggaranya pemerintahan adalah syarat yang harus dilaksanakan. Praktik pemerintahan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi rakyat, impian, cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dari *good governance* di dalam suatu negara adalah proses pelaksanaan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan yang baik. Praktik tata kelolanya *good governance* yaitu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Pelaksanaan pemerintahan yang baik dan efektif adalah apabila dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, profesionalisme dan mempunyai etika yang tinggi (Putra, 2017). *Good governance* memungkinkan para aktivis mewujudkan pemerintahan melalui partisipasi aktor dan institusi di luar pemerintahan dalam proses demokratisasi. Sebagai hasilnya negara, masyarakat sipil dan mekanisme pasar dapat memperoleh manfaat dari pembagian tanggung jawab dan wewenang yang lebih adil, adanya pembagian wewenang dimaksudkan agar terjadi pengendalian dan keseimbangan serta melengkapi dan menyeimbangkan ketiga unsur yang secara bersama-sama menghasilkan energi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat (Dwiyanto, 2006).

Penerapan prinsip *good governance* mulai merata di semua lini sampai lini terbawah yang telah terlaksana di beberapa daerah. Salah contoh penerapan prinsip *good governance* di tingkat Kecamatan yaitu salah satunya ada di Kecamatan Paten Kota Makassar, dimana dalam penerapan yang dilakukan yaitu dengan menjalankan pelayanan administrasi yang optimal, tujuannya agar terciptanya pelayanan administrasi yang baik dapat diterapkan di pemerintah Kecamatan Paten (Ramadani, 2018), dan contoh penerapan *good governance* di tingkat desa yaitu salah satunya berada di Desa Kalibelo yaitu dengan memberikan informasi terkait penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui rapat tahunan yang diadakan pada awal tahun dan akhir tahun yang biasanya disebut Musrebangdes (Putra, 2017). Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian – penelitian terdahulu terletak pada upaya penerapan *good governance* dari segi partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hasil

penelitian ini memperlihatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat telah berjalan dalam menerapkan *good governance* mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di berbagai bidang kehidupan di Kecamatan Gembong.

Peran tokoh masyarakat memang sangat diperlukan untuk dapat menerapkan prinsip *good governance* yaitu melalui partisipasi yang diberikan. Bentuk partisipasi tokoh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan penerapan prinsip *good governance* yaitu seperti perencanaan pembangunan yang dimana bentuk partisipasi tersebut memberikan sebuah ide maupun gagasan di dalam suatu pertemuan atau rapat untuk dapat memberikan usulan terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. (Imtihan & Firmansyah, 2017) Karena dapat mempengaruhi adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, adapun tokoh yang dimaksud disini yaitu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, tokoh perempuan dan tokoh sosial. Agar dapat berjalannya keinginan tersebut maka dapat terwujud melalui dorongan oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam penerapan *good governance* merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan *good governance* dengan baik, baik dalam tahap pelaksanaan, perencanaan, pemanfaatan dan evaluasi pembangunan.

Peranan tokoh masyarakat memang sangat diperlukan untuk dapat menerapkan prinsip *good governance*, karena dapat mempengaruhi adanya peningkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, adapun tokoh yang dimaksud disini yaitu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh sosial, tokoh pendidikan dan tokoh perempuan, karena partisipasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat terhadap pemerintah yaitu salah satunya berpartisipasi dalam musyawarah bersama, tujuannya pemerintahan yang berada di Kecamatan Gembong dapat menampung segala keluhan dan harapan masyarakat Kecamatan Gembong untuk kedepannya nanti, selain itu peran tokoh masyarakat juga berperan aktif dalam peningkatan partisipasi pembangunan, seperti pengelolaan desa wisata dan pengembangan desa pintar sebagai syarat agar masyarakat lebih mampu menggali potensi dan meningkatkan kapasitasnya, maka keinginan tersebut didorong oleh pemerintah sebagai salah satu cara untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dapat mempengaruhi pelaksanaan peningkatan prinsip *good governance* di Kecamatan Gembong, karena pada hakikatnya peran tokoh masyarakat sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Nilai penting penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pelaksanaan *Good Governance* di Kecamatan Gembong Pati berdasarkan pada inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan prinsip *Good Governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif supaya data yang didapat di lapangan lebih detail dan mendalam. Selain itu hasil penelitian melalui kualitatif akan lebih

fleksibel menampilkan data dan analisis dalam kehidupan sosial yang tidak dapat dihitung secara numerik. Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, khususnya di Desa Plukaran, Desa Gembong, Desa Bermi dan Desa Bageng dalam pelaksanaan *good governance*. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, dokumentasi serta wawancara agar dapat menggali data di lapangan secara mendalam. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat antara lain: Camat Kec. Gembong, aktivis pemuda, tokoh perempuan, tokoh keagamaan, tokoh masyarakat bidang sosial, tokoh masyarakat dalam bidang pendidikan yang melakukan partisipasi aktif dalam menerapkan *good governance* dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di berbagai bidang kehidupan di Kecamatan Gembong dalam

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan *Good Governance* di Kecamatan Gembong

Good governance adalah suatu kesepakatan bersama untuk menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Keberadaan prinsip ini akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah, masing-masing komponen prinsip menentukan apakah suatu pemerintahan itu baik atau buruk. Prinsip-prinsip *good governance* yang harus diikuti dan dikembangkan dalam penyelenggaraan *good government* yang telah dikemukakan oleh UNDP (*United Nations Development Planning*). Prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, keadilan, efektivitas dan efisiensi, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, serta visi strategis (Maryam, 2016).

Jika kita berbicara mengenai penerapan *good governance* maka pada dasarnya penerapan *good governance* merupakan terciptanya sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi yang bersifat universal. Hal ini juga dapat menjadi pendorong terwujudnya *political governance* yang mensyaratkan proses pemerintahan yang baik dalam merumuskan kebijakan publik, melaksanakan pembangunan, dan menempatkan birokrasi dalam administrasi publik agar dapat berjalan secara transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Tomuka, 2021).

Pelaksanaan *good governance* di Kecamatan Gembong adalah suatu upaya untuk terwujudnya suatu pemerintah yang baik, yang melalui suatu proses, perumusan, dan perencanaan dalam kebijakan untuk mengedepankan seluruh pemangku kepentingan, yang dimana keterlibatan antara tokoh masyarakat dan pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong. Dalam teori yang sudah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya tersebut sudah diaplikasikan oleh pemerintahan yang ada di Kecamatan Gembong yang dapat dilihat adanya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan jalannya pemerintahan, selain itu juga dapat dilihat dari segi pertanggungjawaban dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan sebuah kebijakan.

Dalam analisis data ini yang akan dibahas yaitu mengenai penerapan *good governance* di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip *good governance*, untuk mencapai penerapan *good governance* dalam segi pembangunan, pengelolaan dan peningkatan sumber daya, maka penerapan yang diterapkan adalah memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan kebutuhannya. Wujud dari bentuk adanya pemerintahan yang baik yaitu dicirikan melalui terselenggaranya pelayanan publik yang baik, hal tersebut sejalan dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibuktikan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk dapat mengatur masyarakat setempat.

Terkait dengan transparansi yang dimana merupakan salah satu aspek dalam terwujudnya *good governance* yaitu mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk sistem standarisasi maupun keterbukaan dalam prosesnya sendiri secara umum jelas bahwa prosedur yang dijalankan diketahui oleh masyarakat.

Berkaitan untuk memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat maka pihak dari pemerintahan Kecamatan Gembong sudah memberikan informasi atau pengumuman baik secara langsung melalui mengedarkan surat edaran di Kantor Camat atau di Kelurahan Desa. Mengenai biaya dalam pelayanan tersebut maka masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, seperti penjelasan bapak Camat bahwa “lembaga pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong, tidak ada pemungutan biaya, dan petugas di bidang pelayanan disini tidak menerima apapun daripada masyarakat,”.

Selanjutnya dilihat dalam bentuk akuntabilitas, akuntabilitas juga salah satu dari prinsip *good governance* menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yang dimana prinsip tersebut merupakan prinsip yang memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan *good governance*. Untuk mengukur bagaimana akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong maka diperlukan adanya indikator yang jelas untuk mengukur pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan. yang dibuktikan melalui adanya laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh bupati.

Mengenai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan pelayanan yang ada di pemerintahan Kecamatan Gembong, setiap tahunnya harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka dengan membuat laporan pertanggung jawaban pada bupati, seperti yang dikutip dari penjelasan bapak Camat bahwa “kewajiban apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib untuk dilaksanakan, kalau untuk segi akuntabilitas sendiri itu masyarakat juga menilai karena semua itu kita pertanggung jawaban oleh bupati”. Maka dari itu pertanggungjawaban adalah suatu kegiatan yang dimana harus dijalankan untuk dapat mengembalikan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Untuk dapat meningkatkan kerjasama antara pemerintah terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat maka dibutuhkan suatu program yang dijalankan secara efektif dan efisien serta dapat membangun visi yang strategis bagi masyarakat, kedua prinsip tersebut merupakan salah satu prinsip yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong melalui adanya terlaksananya suatu program yang dimana program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga nanti semuanya bisa kembali kepada masyarakat, bisa kembali kepada rakyat sehingga tidak akan terjadi hal yang saling mencurigai.

Agar masyarakat bisa memberi kepercayaan penuh terhadap pemerintah maka pemerintah dapat melayani masyarakat dengan adil yaitu memberikan semua pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan satu sama yang lain, selain itu pemerintah menjadi penengah di berbagai kepentingan melalui adanya kegiatan musyawarah yang diselenggarakan. Agar semuanya bisa dilayani dengan baik.

Dalam konteks pengambilan keputusan di tingkat Kecamatan Gembong, selalu melibatkan semua pihak yang berkaitan yaitu masyarakat dan pemerintah, misalnya persoalan dalam pembangunan pemerintah Kecamatan Gembong untuk melibatkan semua pihak termasuk masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan bapak camat bahwa “untuk peran masyarakat sendiri dalam kegiatan pembangunan itu memang sangat dilibatkan sekali, karena kegiatan tersebut memang perlu adanya peran dari masyarakat”. Maka dari itu keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan memang sangat diperlukan, yang dimana diwujudkan melalui kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif.

Tabel 1.1.
Hasil Pelaksanaan Prinsip *Good Governance* Kecamatan Gembong

NO	KRITERIA	BENTUK	PELAKSANAAN
1.	Akuntabilitas	Mempertanggungjawabkan Kinerja Pemerintah	Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan disetorkan kepada bupati
2.	Transparansi	Memberikan sebuah Informasi yang jelas kepada masyarakat	Menyampaikan pengumuman baik secara langsung maupun tidak melalui surat edaran dari pemerintah maupun desa
3.	Partisipasi	Melibatkan seluruh pihak untuk mengambil keputusan	Terlaksanannya kegiatan Musrenbang dan Musrenbangdes
4.	Efisiensi dan Efektivitas	Meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah bagi masyarakat	Terlaksananya program yang diharapkan oleh masyarakat seperti program pembangunan dan desa wisata
5.	Visi Strategis	Masyarakat dan pemerintah memiliki pandangan yang sama untuk terciptanya suatu pemerintahan	Menjalin kerjasama terhadap proses dan kinerja pemerintah dan saling memberikan arahan untuk terciptanya suatu program
6.	Penegakan Hukum	Memberantas adanya KKN	Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pungutan biaya
7.	Daya Tanggap	Melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan	Melayani dalam pembuatan KTP, KK, Ijin pindah tempat, dll
8.	Berorientasi pada konsensus	Mengambil Keputusan	Terlaksananya musyawarah secara bersama melalui rapat yang diselenggarakan

b. Kontribusi Tokoh Masyarakat dalam Penerapan Prinsip *Good Governance*

Keberadaan tokoh masyarakat dalam masyarakat memang sangat diperlukan, hal tersebut merupakan salah satu cara para pemimpin ini berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan suatu daerah atau desa karena mereka berperan sebagai titik sentral dalam terwujudnya suatu daerah atau desa yang memang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan (Kusnadi, 2017).

Pemerintah harus melakukan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk dapat memperkenalkan, mendorong, dan melembagakan kerjasama antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat merasakan manfaatnya. Kerjasama antara tokoh masyarakat dan pemerintah daerah harus dilihat sebagai kebutuhan penting yang tidak bisa dihindari (Marpaung, 2014). Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan melalui dengan merumuskan kebijakan publik dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, pada pemerintahan Kecamatan Gembong keterlibatan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan dapat dilihat melalui program yang telah dijalankan oleh pemerintahan untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengenai kontribusi yang diberikan bahwa kontribusi yang dikeluarkan oleh tokoh masyarakat memiliki manfaat yang lebih untuk pemerintah agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bentuk kontribusi yang diberikan yaitu memberikan pengarahan terhadap pembangunan infrastruktur, mengawasi dalam kegiatan pembangunan, mengadakan kegiatan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan memberikan masukan terhadap program yang akan dilaksanakan. Seperti kutipan yang disampaikan oleh Bapak Sholikhin selaku tokoh masyarakat bahwa “Tentu saja, kami punya pos pos tersendiri mereka yang duduk di pemerintahan juga mempunyai kewenangan sendiri, kami juga punya kewenangan sendiri. Namun secara khusus kami dapat memberikan masukan masukan yang terkait dengan program yang dijalankan”. Pada dasarnya tidak hanya pemerintah yang memiliki kewenangan melainkan tokoh masyarakat juga memiliki kewenangan tersendiri dalam memberikan sebuah kontribusi agar pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong ini dapat menjadi pemerintahan yang baik.

c. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menerapkan Prinsip *Good Governance*

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. peran dan kedudukan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada peran tanpa jabatan, demikian pula tidak ada jabatan tanpa peran. Tergantung pada pola sosial kehidupan mereka, setiap orang memainkan berbagai peran, hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan kontribusi yang diberikannya kepada masyarakat dan kesempatan yang diberikan kepadanya. Peranan menjadi sangat penting karena mengendalikan perilaku seseorang, maka perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peran mereka dan perilaku orang – orang dikelompoknya (Fahreza, 2022).

Pemerintah harus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, sehingga kerjasama ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan di tingkat masyarakat. Pemerintah memiliki peran sebagai pengambil keputusan dan tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan *good*

governance. Sedangkan masyarakat merupakan penggerak keputusan yang dibuat oleh pemerintah, maka dari itu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan *good governance* dan meningkatkan kualitas pelayanan (Fiqri, 2022).

Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh yang dimana dia mempunyai sesuatu yang berbeda atau menonjol dengan masyarakat yang lainnya dan dapat bersosialisasi di lingkup masyarakat, selain itu dapat membuat perubahan lingkungan atau daerahnya untuk dapat bergerak ke arah yang lebih modern dan positif, maka dalam perbuatan maupun tindakannya tokoh masyarakat dapat meletakkan posisi penting di tengah – tengah masyarakat yang lain, untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam kehidupan masyarakat seperti pembangunan, dengan menjaga hubungan sosial yang positif diterapkan dalam pergaulan masyarakat (Fiqri 2022).

Dalam analisis data ini yang akan dibahas yaitu mengenai peran tokoh masyarakat di Kecamatan Gembong dalam menerapkan prinsip *good governance* untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka perlu adanya peran tokoh masyarakat untuk membangun partisipasi karena hal tersebut adalah salah satu komponen yang paling utama untuk membangun *good governance*, hal tersebut searah dengan tuntutan yang dijalankan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dengan adanya peran dari tokoh masyarakat sekitar maka segala kebutuhan mereka akan sesuai dengan yang diharapkan untuk terciptanya *good governance*. Peneliti menggunakan beberapa tokoh masyarakat untuk dijadikan sebagai pertimbangan, tokoh tersebut diantara tokoh agama, tokoh sosial, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan baik itu tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh sosial, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, bahwa keterlibatan mereka dalam menerapkan *good governance* dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sangat berpengaruh sekali dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah yang baik. Hasil analisa yang didapat dalam bentuk keterlibatan tokoh masyarakat tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Tokoh agama dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang keagamaan yaitu melayani masyarakat dalam urusan pernikahan, memberikan penyuluhan keagamaan, meningkatkan pembangunan kesadaran mental dan dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengawasi jalannya pembangunan masjid yang dilakukan secara bergotong royong.
- 2) Tokoh sosial dalam keterlibatannya yaitu dengan mengawasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, selain itu mengikutsertakan lembaga yang ada untuk ikut aktif dalam pengawasan program tersebut. Serta memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah khususnya di bidang sosial.
- 3) Tokoh pendidikan dalam keterlibatannya yaitu dengan menyampaikan hak rakyatnya ke menteri sosial terkait dengan anggaran pemerintahan dalam pembangunan madrasah pondok pesantren, dan mengusulkan agar guru madrasah diniyah diberikan bisyaroh berupa uang agar guru yang mengajar di madrasah diniyah mendapatkan hasil imbalan selama beliau mengajar. Serta memberikan wawasan kepada para didiknya mengenai pentingnya menimba ilmu.
- 4) Tokoh pemuda, keterlibatan tokoh pemuda dalam penerapan *good governance* yaitu melalui pendekatan kepada remaja atau pemuda yang lain agar ikut aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat, yaitu melalui program yang

direncanakan oleh tokoh pemuda kemudian diagendakan rapat untuk membahas program yang dijalankan, seperti kegiatan olahraga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah ditempatnya, dan dikelola dengan hal yang bermanfaat.

- 5) Tokoh perempuan, keterlibatannya yaitu mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam jalannya pemerintah, dan mengajak kaum wanita yang lain agar menjadi wanita yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, dan dalam kegiatan pembangunan yaitu ikut memberikan masukan dan arahan terhadap pemerintah melalui Musrenbangdes.

Untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik, tokoh masyarakat harus dapat menerapkan prinsip *good governance* dalam tata pemerintahan yang ada di Kecamatan Gembong

1) Prinsip Penegakan Hukum

Prinsip penegakan hukum adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam jalannya pemerintahan yang baik. Supremasi Hukum (Rule of Law) adalah salah satu contohnya. Sebuah sistem dan aturan hukum diperlukan untuk pembuatan kebijakan publik dan partisipasi dalam politik. Oleh karena itu, suatu tim harus berkolaborasi untuk mewujudkan negara hukum yang sesuai (Fahreza, 2022).

Pemerintah yang ada di Kecamatan Gembong dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak setiap masyarakat dapat terlindungi. Terkait dengan hal tersebut bahwa penelitian yang dilakukan dengan tokoh masyarakat bahwa dalam menjalankan asas kepastian hukum berjalan dengan baik, dan kebijakan yang diambil dari pemerintah Kecamatan Gembong didasarkan dengan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan terhindar adanya tindakan KKN yaitu dengan memberikan suatu pelayanan tanpa adanya pungutan biaya.

2) Prinsip Daya Tanggap

Penerapan asas ini yang diterapkan oleh tokoh masyarakat dapat dilihat dengan kegiatan Musrenbangdes atau Musrenbang, melalui kegiatan tersebut tokoh masyarakat dapat menentukan program kerja baik di desa maupun di kecamatan berdasarkan masukan dari berbagai tokoh masyarakat yang dilibatkan.

3) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas adalah proses di mana seseorang atau kelompok orang wajib mempresentasikan laporan kegiatan dan dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas mereka. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam menjalankan prinsip ini yaitu dalam pelaksanaan tugasnya tokoh masyarakat memberikan informasi kepada pemerintah melalui langsung dan tidak langsung.

4) Prinsip Transparansi

Penerapan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi antara masyarakat dengan pemerintah, agar dapat menjalin suatu komunikasi dengan baik (Syam, 2022).

Hasil wawancara yang dilakukan bahwa memperlihatkan bahwa pemerintahan Kecamatan Gembong sudah memberikan informasi terkait dengan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dilakukan agar tokoh masyarakat mengetahui secara detail mengenai kinerja dari pemerintahan Kecamatan Gembong, khususnya dalam pembangunan, secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Gembong dapat mendorong tokoh masyarakat dapat berpartisipasi terhadap program yang dilaksanakan.

5) Prinsip Efisiensi dan Efektifitas

Prinsip efisiensi dan efektifitas adalah meningkatkan kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, Agar penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Gembong dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah menentukan skala terhadap dengan pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Untuk hasil penelitian yang dilakukan bahwa prinsip efisiensi dan efektifitas yang diterapkan oleh tokoh masyarakat yaitu sudah berjalan baik melalui dengan pengembangan sumber daya manusianya dengan berperan aktif untuk dapat terwujudnya pengelolaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

6) Prinsip Keadilan dan Berorientasi Pada Konsensus

Prinsip pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik bagi warga negara baik laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah antara berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan setiap orang (Maryam, 2016).

Dari penelitian yang dilakukan bahwa adanya sifat keadilan terhadap pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya dan dari tokoh masyarakat juga menilai bahwa pemerintah selalu menjadi penengah di berbagai forum untuk dapat terjalannya musyawarah dengan baik.

7) Prinsip Partisipasi dan Daya Tanggap

Semua warga negara memiliki suara dalam keputusan yang dibuat dengan pemungutan suara, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang secara sah mewakili kepentingan mereka. Kebebasan berkumpul dan berekspresi, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, merupakan landasan dibangunnya partisipasi menyeluruh ini. Partisipasi berarti memastikan bahwa setiap kebijakan didasarkan pada aspirasi rakyat. Pemerintah menawarkan saluran komunikasi yang dapat digunakan warga untuk menyuarakan pendapatnya dalam upaya mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjamin kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara (Dewi dkk, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa prinsip partisipasi telah dijalankan oleh pemerintahan di Kecamatan Gembong dan tokoh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan Kecamatan Gembong maupun di lingkup desanya masing – masing, keterlibatan tokoh masyarakat adalah untuk membangun kesepahaman antara tokoh masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan dan kemajuan dengan cara memotret potensi dan sumber – sumber pembangunan yang tersedia baik itu dari dalam maupun dari luar daerah.

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan tokoh masyarakat juga dilibatkan sebagai pelaksana atau memantau program pembangunan yang dilaksanakan serta melakukan evaluasi pelaksanaan program tersebut.

KESIMPULAN

Penerapan *good governance* yang diterapkan oleh pemerintahan Kecamatan Gembong sudah memenuhi standar yang baik yaitu meliputi adanya keadilan, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk peran tokoh masyarakat dalam penerapan prinsip *good governance* memiliki peranan yang sangat penting, dan dapat menentukan sebagai nasihat, saran, yang mampu memberikan sebuah dorongan agar setiap program yang dijalankan pemerintah, warga masyarakat yang lainnya juga ikut serta dalam berpartisipasi. Keterlibatan tokoh masyarakat yang ada sangat beragam seperti tokoh agama, tokoh pendidikan, sosial, pemuda, dan tokoh perempuan dalam menjalankan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di pemerintahan Kecamatan Gembong maupun di lingkup desanya masing – masing, hal tersebut untuk membangun kesepahaman antara tokoh masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan dan kemajuan dengan cara memotret potensi dan sumber – sumber pembangunan yang tersedia baik itu dari dalam maupun dari luar daerah.

REFERENSI

- Dwiyanto, Agus. 2006. *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press).
- Fahreza, Joni. 2022. Skripsi *“Peranan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Lokal Di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Jambi”* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Fiqri, Muhammad Hidayatulloh. Muhammad Turhan Yani. 2022. *“Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Jogoroto Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 10 No 3 Tahun 2022, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2874306>
- Imtihan, Husnul. Firmansyah, Wahyunadi. *“Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”*, Jurnal Neo-Bis, Vol 11 No 1, Juni 2017.
- Kusnadi, Edi. Dadan Iskandar, *“Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna”*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol VI, No 1. Juni 2016. <https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>
- Marpaung, Lintje Anna. 2014. *“Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Sebagai Cara Memperkuat Penyelenggaraan Otonomi Daerah”*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11084/9638>
- Dewi, Ajeng Nurmala. Gunawan, Wahyu. Sutisna, Jajang. 2019. *“Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Sidanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka (Studi Pada*

- Pengelolaan Dana Desa di Desa Sindanghaji Tahun 2019*), <https://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/view/33025>
- Putra, Hendi Sandi. 2017. “Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri”, <https://repository.unair.ac.id/68212/>. 2017
<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-jadi-contoh-penerapan-good-governance-nasional/>
- Ramadani, Fidyah Nita. 2018 “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten (Studi Kasus pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makasar). <http://eprints.unm.ac.id/10078/>
- Syam, Ozi Muammar. 2022. Skripsi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyasah”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Tahun 2022.
- Tomuka, Shinta. 2021. “Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)”, <https://www.neliti.com/publications/1009/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pelayanan-publik-di-kecamatan-gi.2021>
<https://www.patikab.go.id/v2/id/2009/11/19/gembong/>